

Peningkatan Pemahaman Tentang Kepemilikan Npwp dan Proses Pembuatan Npwp Pada Umkm di Karawaci

Veronika Erlita Januarti Gunawan^{1*}, Irene Angelina²
Program Studi Akuntansi Universitas Matana
Email: veronika.gunawan@student.matanauniversity.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : Juni 2024

Direvisi : Juni 2024

Disetujui : Agustus 2024

Kata Kunci :

NPWP, UMKM, Karawaci,
Kepatuhan Pajak,
Sosialisasi, Pelatihan.

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Peningkatan Pemahaman Tentang Kepemilikan NPWP dan Proses Pembuatan NPWP pada UMKM di Karawaci" bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Karawaci mengenai pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan identitas perpajakan yang penting bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Melalui program ini, pelatihan dan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat kepemilikan NPWP, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, serta langkah-langkah dalam proses pembuatan NPWP. Metode yang digunakan meliputi diskusi interaktif dan simulasi pengisian formulir NPWP. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman UMKM untuk memiliki dan mengurus NPWP. Partisipasi aktif dan feedback positif dari peserta menunjukkan bahwa program ini berhasil memenuhi tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM Karawaci. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong legalitas dan ketaatan perpajakan pelaku UMKM, sehingga dapat berkontribusi lebih baik pada perekonomian daerah dan nasional.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: June 2024

Revised: June 2024

Accepted: August 2024

Keywords:

NPWP, MSMEs,
Karawaci, tax compliance,
socialization, training.

ABSTRACT

The community service program with the title "Increasing Understanding of NPWP Ownership and the NPWP Making Process for UMKM in Karawaci" aims to increase knowledge and awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Karawaci regarding the importance of Taxpayer Identification Numbers (NPWP). NPWP is an important tax identity for business actors to fulfill their tax obligations. Through this program, training and outreach are carried out to provide a comprehensive understanding of the benefits of owning a NPWP, the tax obligations that must be fulfilled, as well as the steps in the process of creating a NPWP. The methods used include interactive discussions and simulations of filling out NPWP forms. The results of this activity show a significant increase in UMKM understanding of having and managing a NPWP. Active participation and positive feedback from participants shows that this program has

succeeded in fulfilling its objectives, namely increasing tax awareness and compliance among Karawaci UMKM. It is hoped that this activity can make a positive contribution in encouraging the legality and tax compliance of UMKM actors, so that they can contribute better to regional and national economy's goal, which was to increase awareness and tax compliance among Karawaci UMKM. It is hoped that this activity can make a positive contribution in encouraging the legality and tax compliance of UMKM actors, so that it can contribute better to the regional and national economy.

1. Pendahuluan

Seiring dengan evolusi ekonomi, teknologi informasi, serta dinamika sosial dan politik, regulasi perpajakan di Indonesia terus diperbarui. Tujuan dari revisi peraturan perundang-undangan pajak, terutama yang berkaitan dengan ketentuan umum dan prosedur perpajakan, adalah untuk memastikan keadilan lebih tercapai, memperbaiki layanan untuk wajib pajak, serta menguatkan kepastian hukum dan penegakan hukum. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak dan mempromosikan kepatuhan pajak. Karakteristik dari perubahan ini mencakup sistem dan mekanisme yang sederhana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, seraya mengadopsi sistem self-assessment. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berusaha mengembangkan berbagai sektor. Untuk memajukan pembangunan secara berkelanjutan dan independen, Indonesia harus mengurangi dependensinya terhadap dana dari negara asing. Langkah strategis yang bisa diambil adalah melalui peningkatan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak. Pajak, sebagai komponen krusial dalam struktur penerimaan, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan pajak secara bertahap, dimulai dari Rp. 743 triliun pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp. 839 triliun pada tahun 2011, dan akhirnya mencapai Rp. 1.019 triliun pada tahun 2012. Inisiatif ini esensial untuk mendukung Indonesia menjadi lebih mandiri dalam membiayai berbagai proyek pembangunannya. Kebijakan perluasan basis pajak yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk memperluas jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Melalui kebijakan ini, diharapkan bahwa akan terjadi peningkatan dalam jumlah wajib pajak, yang memungkinkan peningkatan dalam penerimaan negara. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan indikator krusial dalam mengukur kepatuhan pajak. NPWP diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administratif dalam pengelolaan perpajakan, yang berfungsi sebagai identifikasi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. Pentingnya kepemilikan NPWP oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa diabaikan mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap ekonomi nasional. Namun, tingkat kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pentingnya memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Penelitian di Karawaci telah mengungkapkan bahwa pemahaman yang lebih baik dan tingkat kesadaran yang tinggi pada wajib pajak memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam mempunyai NPWP dibandingkan dengan sikap mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan

pajak. Hasil ini menyarankan perlunya peningkatan dalam edukasi dan sosialisasi untuk UMKM agar mengerti pentingnya kepemilikan NPWP. Penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP sangat dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan yang mereka miliki. Di sisi lain, hasil penelitian di Karawaci menyoroiti bahwa tidak hanya pengetahuan dan kesadaran yang penting, tetapi juga pemahaman wajib pajak tentang manfaat memegang NPWP dan implikasi dari pelanggaran ketentuan perpajakan secara positif mempengaruhi kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengedukasi wajib pajak mengenai keuntungan memiliki NPWP serta potensi sanksi yang mungkin diterima akibat ketidakpatuhan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM. Di Karawaci, tingkat kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP juga menjadi perhatian. Karawaci sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM, baik di sektor kecantikan maupun industri makanan, memerlukan pendekatan khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan NPWP. Berdasarkan data yang ada, banyak UMKM di Karawaci yang belum memiliki NPWP atau belum memahami sepenuhnya manfaat dan kewajiban yang terkait dengan kepemilikan NPWP. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di daerah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Pajak, asosiasi UMKM, dan lembaga pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang pentingnya memiliki NPWP dan kewajiban perpajakan bagi UMKM. Kegiatan ini dapat melibatkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak dan praktisi perpajakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pelaku UMKM.
2. Bimbingan Teknis: Memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada UMKM dalam proses pendaftaran NPWP dan pelaporan pajak. Bimbingan ini dapat dilakukan melalui program pendampingan atau klinik pajak yang diselenggarakan secara rutin.
3. Kerjasama dengan Asosiasi UMKM: Bekerjasama dengan asosiasi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dan memfasilitasi mereka dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi tentang perpajakan dan NPWP melalui media sosial, website, dan aplikasi mobile. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran NPWP secara online.
5. Pemberian Insentif: Memberikan insentif atau penghargaan kepada UMKM yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Insentif ini dapat berupa potongan pajak, sertifikat kepatuhan, atau penghargaan lainnya yang dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat pemahaman dan kesadaran UMKM di Karawaci tentang pentingnya kepemilikan NPWP dapat meningkat. Peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UMKM akan berdampak positif terhadap penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kepemilikan NPWP, prosedur pembuatan NPWP, dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Karawaci. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperluas basis pajak, terutama dalam sektor UMKM.

2. Metode Pelaksanaan

Implementasi Program Kemitraan Masyarakat (PKM) meliputi tiga fase penting: tahap persiapan, tahap eksekusi, dan tahap pemantauan.

Tahap Persiapan

Membuat rancangan program kerja pelatihan dan penyuluhan agar pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur dan fokus. Program ini mencakup segala aspek teknis, manajerial, dan penentuan jadwal.

- Pengembangan modul pelatihan yang mendukung penyuluhan dan penanganan berkelanjutan.
- Menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelatihan dan penyuluhan.
- Mengatur koordinasi di lapangan yang akan dijalankan oleh Tim. Program pemahaman dan penerbitan NPWP akan diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali untuk memastikan kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap tujuan kegiatan ini. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini telah ditentukan sesuai kesepakatan area yang telah disepakati. Untuk sosialisasi pertama, kami akan melibatkan pemilik UMKM di wilayah tersebut.

Tahap Pelaksanaan

Pada sesi sosialisasi awal, dibahas tentang prosedur pengajuan dan manfaat memiliki NPWP bagi UMKM. Sesi kedua difokuskan pada pemberian informasi mendetail mengenai prosedur pembuatan NPWP khusus untuk UMKM, termasuk keuntungan yang dapat diperoleh dari kepemilikan NPWP. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi pemilik UMKM dan Tim Pengabdian Masyarakat dari Universitas Matana.

- Sesi pelatihan khusus diadakan untuk membantu pendaftaran NPWP bagi UMKM. Sebagai bagian dari serangkaian sosialisasi yang sebelumnya telah dijalankan, pelatihan ini diorganisir dengan pendekatan praktis di lapangan. Mahasiswa dari Universitas Matana, yang telah berpengalaman dalam pembuatan NPWP, akan memberikan bimbingan langsung. UMKM, setelah menerima instruksi dari Tim Universitas Matana, akan menjalankan praktik tersebut. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan pemahaman mendalam UMKM mengenai kepemilikan dan proses pembuatan NPWP, dengan harapan kegiatan ini akan berkelanjutan dan dilakukan secara komprehensif.

Tahap Monitoring

Dalam tahap ini, pengawasan terhadap kegiatan yang diorganisir oleh tim Mahasiswi Universitas Matana dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses evaluasi berjalan paralel dengan pengawasan agar segala hambatan yang muncul bisa segera diatasi. Evaluasi ini diimplementasikan di setiap fase kegiatan, dengan rancangan evaluasi yang menjelaskan metodologi, waktu pelaksanaan, kriteria sukses, indikator pencapaian tujuan, dan standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Selain itu, diberikan juga pelatihan dan sosialisasi kepada UMKM untuk meningkatkan pemahaman mengenai kepemilikan NPWP serta prosedur pembuatan NPWP. Dengan begitu UMKM mendukung program pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Laporan ini menguraikan temuan dari suatu program pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk memperluas wawasan para pelaku UMKM di Karawaci mengenai pentingnya memiliki dan proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program ini berhasil menarik satu peserta yang merupakan penyedia jasa salon kuku. Informasi yang terkumpul mencatat peningkatan pemahaman peserta tentang NPWP dari sebelum hingga sesudah mengikuti program, dorongan yang lebih kuat bagi peserta untuk mendaftar NPWP, dan tingkat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan program ini. Hasil kegiatan ini disajikan secara objektif berdasarkan data yang diperoleh melalui pemaparan materi selama kegiatan, serta catatan selama pelatihan dan bimbingan teknis. Sebelum kegiatan, pelaku UMKM hanya memiliki pengertian sebesar 10% tentang fungsi dan manfaat NPWP. Fungsi dan manfaat NPWP yang dimiliki hanya berguna untuk identitas usaha dan pungutan dari hasil penjualan yang harus dilaporkan dan dibayarkan kepada pemerintah setempat. Setelah kegiatan, angka ini meningkat menjadi 50%, menunjukkan peningkatan pemahaman kegunaan lain dari NPWP. Kegiatan ini tidak dapat kami laporkan dan katakan berhasil 100%, karena setelah pemaparan materi, penjelasan kegunaan kepemilikan NPWP dan tata cara proses pendaftaran NPWP yang mudah dan cepat baik melalui online mau offline belum ada keinginan dari pelaku UMKM dalam waktu dekat ini untuk memiliki NPWP sebagai identitas dan legalitas usaha pelaku UMKM. Dari tahap monitoring pelaku UMKM menjelaskan alasannya untuk tidak mendaftarkan kepemilikan NPWP bagi usahanya karena usaha yang dimiliki masih terbilang kecil dan baru berjalan sekitar 6 bulan. Serta ada komunikasi dengan pasangan pelaku 13 UMKM yang melarang pendaftaran NPWP karena ditakutkan berimbas terhadap pembayaran pajak tahunan pasangan pelaku UMKM.

Fokus pembahasan adalah memahami bagaimana kegiatan ini berhasil atau tidak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengurus NPWP. Kami membahas berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini, termasuk efektivitas metode sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis yang diberikan. Pembahasan ini juga mencakup refleksi tentang tantangan yang dihadapi dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)," kami mengidentifikasi sejumlah masalah mendasar yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pemahaman dan kepatuhan perpajakan. Sebelum kegiatan dimulai, pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami pentingnya kepemilikan NPWP sebagai salah satu identitas dan legalitas bagi kegiatan usaha yang mereka lakukan. Pelaku UMKM merasa prosedur perpajakan rumit dan tidak relevan dengan skala usaha yang mereka rasa masih kecil dan tengah berkembang. Oleh karena itu, melalui serangkaian sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan, kami berusaha meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat memiliki NPWP. Kami memaparkan beberapa manfaat kepemilikan NPWP yaitu sbb:

- a. Legalitas dan kepercayaan Kepemilikan NPWP memberikan status x`legal yang lebih formal bagi pelaku usaha UMKM.
- b. Akses ke Fasilitas Perbankan NPWP sering menjadi syarat utama untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan atau mendapatkan fasilitas perbankan lainnya, seperti pinjaman atau kredit usaha. Dengan memiliki NPWP, UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
- c. Dengan memegang NPWP, UMKM memiliki akses ke beragam insentif dan subsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan bisnis mereka.
- d. Profesionalisme dan Kredibilitas Terdapat peningkatan profesionalisme dan kredibilitas dalam bisnis ketika seorang pelaku usaha memiliki NPWP, menunjukkan kepatuhan dan pelaksanaan usaha yang sesuai dengan regulasi yang ada.
- e. Perlindungan Hukum Dengan memiliki NPWP, pelaku UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik terkait dengan berbagai aspek bisnis mereka.

Misalnya, dalam hal perselisihan atau masalah hukum lainnya, memiliki NPWP dapat menjadi bukti bahwa usaha dijalankan secara resmi dan sah. Diskusi dan pelatihan teknis diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap legalitas usaha mereka. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prosedur pembuatan NPWP bagi pelaku usaha UMKM, yang meliputi beberapa dokumen yang harus disiapkan:

- a. Fotokopi akta pendirian usaha
- b. Bila merupakan kantor cabang, maka harus melampirkan surat keterangan dari kantor pusat
- c. Fotokopi KTP pemilik atau salah satu pengurus badan usaha
- d. Fotokopi NPWP pemilik atau salah satu pengurus badan usaha
- e. Surat keterangan sebagai bukti untuk memastikan keberadaan kegiatan usaha, setidaknya diterbitkan pejabat setingkat Lurah atau Kepala Desa
- f. Bukti pembayaran tagihan listrik 15

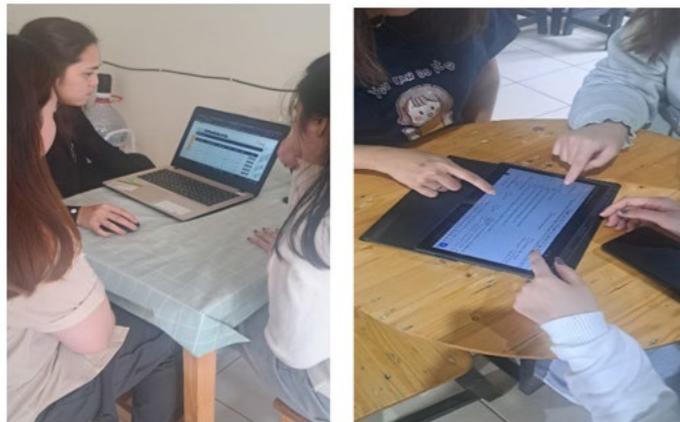
Tidak hanya persyaratan kami juga menyampaikan bahwa untuk pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online maupun offline. Proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini dapat dilaksanakan secara online melalui internet. Tahapan yang harus diikuti untuk mendaftar secara online adalah sebagai berikut:

- a. Akses situs ereg.pajak.co.id dan buka aplikasi e-Reg
- b. Isi formulir pendaftaran sebagai Wajib Pajak
- c. Permohonan Anda akan diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Alternatif lain untuk mendaftar NPWP adalah dengan mengunjungi KPP terdekat. Langkah ini memungkinkan pemohon untuk mendapat bimbingan langsung dari petugas. Adapun prosedurnya mencakup:

- a. Pengisian formulir pendaftaran
- b. Penyediaan dokumen yang diperlukan
- c. Proses pengajuan permohonan oleh KPP

Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi pelaku UMKM, yang menggambarkan pentingnya pendekatan edukatif dalam mengatasi permasalahan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Sebelum kegiatan, pelaku UMKM yang tidak menyadari pentingnya NPWP, seperti prosedur pendaftaran dan syarat – syarat kelengkapan dokumen. Kebanyakan peserta menganggap bahwa proses administrasi pajak rumit dan memakan waktu, sehingga cenderung mengabaikan kewajiban ini. Namun, melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat NPWP, seperti akses ke berbagai fasilitas keuangan dan legitimasi usaha. Selain itu, pelatihan teknis yang diberikan memampukan peserta untuk melakukan pendaftaran NPWP secara mandiri. Implementasi teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi perpajakan juga mempermudah peserta dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Evaluasi yang 16 dilakukan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kemampuan peserta, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan keberlanjutan usaha mereka. Keseluruhan kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi dan simplifikasi prosedur perpajakan bagi UMKM untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka terhadap perekonomian negara.



Gambar 1. Penyampaian Materi

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang kepemilikan NPWP dan proses pembuatannya bagi pelaku UMKM di Karawaci menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sebelum kegiatan, peserta hanya memiliki pemahaman sebesar 10% mengenai fungsi dan manfaat NPWP. Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman ini meningkat menjadi 50%, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya NPWP dalam operasional usaha dan akses ke berbagai fasilitas keuangan.

Meskipun pemahaman peserta meningkat, keinginan untuk segera mendaftarkan NPWP masih rendah. Pelaku UMKM menyatakan beberapa alasan, termasuk skala usaha yang masih kecil dan ketakutan akan dampak pada kewajiban pajak pasangan. Faktor-faktor ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan dukungan berkelanjutan untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Pembahasan menggarisbawahi bahwa efektivitas sosialisasi dan pelatihan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta tentang NPWP. Program ini juga menekankan manfaat kepemilikan NPWP, seperti legalitas usaha, akses ke fasilitas perbankan, peluang mendapatkan insentif, peningkatan kredibilitas, dan perlindungan hukum. Namun, tantangan yang dihadapi, termasuk persepsi prosedur yang rumit dan ketidakpercayaan terhadap proses pajak, harus diatasi dengan strategi edukatif yang lebih baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai NPWP dan proses pembuatannya. Namun, keberhasilan penuh memerlukan upaya lanjutan, termasuk dukungan teknis yang lebih intensif dan penyuluhan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, edukasi yang lebih mendalam dan simplifikasi prosedur perpajakan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara. Program-program serupa di masa depan perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado. 2015. Laporan Tahunan 2015. Manado: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2007. Hukum Pajak. Edisi Lima. Salemba Empat, Jakarta..
- Indrawijaya, Adam. 2003. Perilaku Organisasi. Pustaka Sinar Baru, Bandung.
- Indrianto, N. dan Supomo, B. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE, Jogjakarta
- Kurniawan, B. 2013. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nimran, Umar. 2003. Perilaku Organisasi. CV. Citra Media, Surabaya.
- Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. [Online] Tersedia: www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-28-2007. Diakses 4 Februari 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta. [Online] Tersedia: <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU20Tahun2008UMKM>. Diakses 4 Februari
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP. Jakarta
- Putri, W.P. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Batu. [Online] Tersedia: <http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/501>. Diakses 6 Februari 2014.
- Santoso, S. 2004. Menguasai Statistik dengan SPSS. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Simanjuntak, R.H. 2005. Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto, E. 2006. Akuntansi Perpajakan. Edisi Kedua. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tjiptono, F. 2008. Strategi Pemasaran. Edisi Ketiga. Andi Offset, Yogyakarta.
- Umar, H. 2003. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada, Jakarta